



**PEMERINTAH KOTA BIMA**

# LKIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
Jln. Gatot Subroto No.01 Telp./Fax. (0374) 646441 Raba-Bima  
**Tahun 2018**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya hingga saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Tahun 2017.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka perlu penerapan system yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kota Bima menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Tahun 2017 sebagai media akuntabilitas, media hubungan kerja organisasi dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja SKPD.

Akhirnya diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja diwaktu yang akan datang dapat lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kota Bima, Pebruari 2018

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  
Kota Bima,



**MUHAMMAD AMIN, S.Sos**

NIP. 19621231 198502 1 024



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi .....	1
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi .....	5
1.4. Gambaran Umum Pelayanan .....	11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	18
2.1. Rencana Strategis .....	18
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	25
2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	26
2.4. Penetapan Kinerja .....	27
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	30
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	31
3.2. Akuntabilitas Anggaran .....	46
BAB IV. PENUTUP .....	52
LAMPIRAN .....	53
- Perjanjianan Kinerja	
- Pengukuran Kinerja	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima tahun 2017 diharapkan dapat:

1. Mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima di dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **1.2. Gambaran Umum Organisasi**

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima sampai akhir tahun 2017 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang pegawai. dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana pada Tabel berikut:



Jumlah Pegawai Dinas PUPR Berdasarkan Jabatan Struktural  
Per 31 Desember 2017

No	Golongan	Jumlah	
1.	Jabatan Struktural:		
	a. Eselon II	1	Orang
	b. Eselon III	5	Orang
	c. Eselon IV	16	Orang
2.	Jabatan Fungsional Umum	55	
	Total	77	Orang

Sumber Data : DUK Dinas PUPR Tahun 2017

Jumlah Pegawai Dinas PUPR Berdasarkan Golongan Ruang  
Per 31 Desember 2017

No	Golongan	Jumlah	
1.	Pembina Utama Muda /IVc	0	Orang
2.	Pembina Tk.I / IVb	0	Orang
3.	Pembina / IVa	3	Orang
4.	Penata Muda Tk.I /IIIId	10	Orang
5.	Penata / IIIc	13	Orang
6.	Penata Muda Tk.I / IIIb	18	Orang
7.	Penata Muda / IIIa	16	Orang
8.	Pengatur Tk.I / IIId	0	Orang
9.	Pengatur / IIc	8	Orang
10.	Pengatur Muda Tk.I / IIb	4	Orang
11.	Pengatur Muda / IIa	3	Orang
12.	Juru Tk.I / Id	1	Orang
13.	Juru / Ic	1	Orang
14.	Juru Muda Tk.I / Ib	0	Orang
15.	Juru Muda / Ia	0	Orang
	Total	77	Orang

Sumber Data : DUK Dinas PUPR Tahun 2017



Jumlah Pegawai Dinas PUPR Berdasarkan  
Pendidikan  
Per 31 Desember 2017

No	Pendidikan	Jumlah	
1.	SD	1	Orang
2.	SLTP	2	Orang
3.	SLTA	15	Orang
4.	D3	0	Orang
5.	D4	0	Orang
6.	S1	50	Orang
7.	S2	9	Orang
Total		77	Orang

Sumber Data : DUK Dinas PUPR Tahun 2017

Jumlah Pegawai Dinas PUPR Berdasarkan  
Gender  
Per 31 Desember 2017

No	Pendidikan	Jumlah	
1.	Pria	62	Orang
2.	Wanita	15	Orang
Total		77	Orang

Sumber Data : DUK Dinas PUPR Tahun 2017

### 1.2.1. Susunan Organisasi

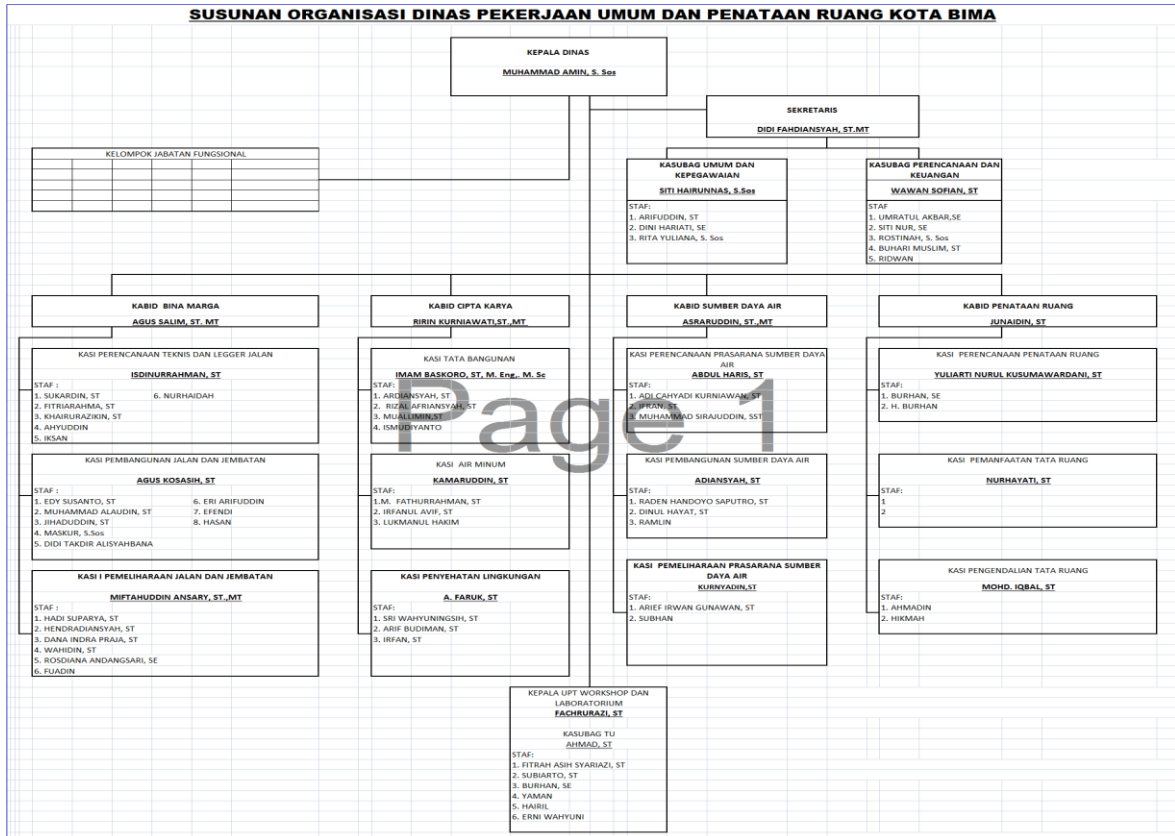
Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
  - a. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
    - (i) Sub Bidang Perencanaan Teknis dan Legger Jalan;
    - (ii) Sub Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;



- (iii) Sub Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - b. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
    - (i) Sub Bidang Tata Bangunan;
    - (ii) Sub Bidang Air Minum;
    - (iii) Sub Bidang Penyehatan Lingkungan.
  - c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
    - (i) Sub Bidang Perencanaan Prasarana Sumber Daya Air;
    - (ii) Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Air;
    - (iii) Sub Bidang Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.
  - d. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari:
    - (i) Sub Bidang Perencanaan Penataan Ruang;
    - (ii) Sub Bidang Pemanfaatan Tata Ruang;
    - (iii) Sub Bidang Pengendalian Tata Ruang.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Work Shop.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 1.2.2. Struktur Organisasi



### 1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

#### 1.3.1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88), serta Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja OPD Kota Bima

Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima mempunyai tugas utama membantu Walikota dalam memimpin, melaksanakan koordinasi, penyusunan perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut.

- Perumusan dan penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas sesuai dengan Visi dan Misi Daerah.
- Penetapan Rencana Strategis Dinas untuk mendukung Visi dan Misi Daerah serta kebijakan Walikota.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur serta pengelolaan prasarana dan sarana Perangkat Daerah.
- Pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya diberikan atasan.

Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut.

#### A. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan program kerja Dinas;
  - b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkup dinas;



- c. Penyiapan bahan, pedoman/petunjuk tata laksana administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
  - d. Penyiapan dan Koordinasi rencana anggaran dan belanja dinas;
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ;
  - f. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pada Sekretariat terdapat 2 (dua) Sub Bagian yaitu:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dalam pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan dan melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian dan penataan organisasi dinas serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, fasilitas teknis dan laporan yang meliputi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengendalian dalam program, penyusunan laporan, melakukan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, evaluasi dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

*B. Bidang Bina Marga*

- 1. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan teknis, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 2. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana kerja dinas dan program pembangunan di bidang ke-bina margaan;
  - b. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan pengendalian dan pembinaan dalam bidang bina marga;

- c. Pelaksanaan pembangunan/peningkatan/pemeliharaan Jalan/Jembatan dan bangunan pelengkapya;
  - d. Pengawasan dan pengendalian dalam rangka memberikan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pekerjaan kebinamargaan;
  - e. Fasilitasi kerja sama dalam pengembangan prasarana/sarana jalan dan jembatan;
  - f. Penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
  - g. Pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pada Bidang Bina Marga terdapat 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
- a. Sub Bidang Perencanaan Teknis dan Legger Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan jalan dan jembatan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - b. Sub Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan jalan dan jembatan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - c. Sub Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program pemeliharaan jalan dan jembatan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### C. Bidang Cipta Karya

1. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan wilayah, pembangunan prasarana pemukiman, pembinaan penataan bangunan dan pengembangan perumahan, perkotaan;
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis dan program pembangunan di bidang cipta karya;
  - b. Pembinaan, pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan dalam bidang perumahan dan pemukiman;
  - c. Pengawasan, pengendalian serta penyiapan pedoman dan petunjuk teknis dan pelaksanaan penimbangan prasarana perumahan dan pemukiman;
  - d. Pengelolaan gedung pemerintah dan rumah dinas;
  - e. Pengumpulan, pengelolaan data, evaluasi dan pelaporan di bidang cipta karya;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pada Bidang Cipta Karya terdapat 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
- a. Sub Bidang Tata Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana pelaksanaan pembangunan dalam bidang perumahan dan pemukiman serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - b. Sub Bidang Air Minum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan pelaksanaan pembangunan dalam Pengelolaan Air Minum serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - c. Sub Bidang Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan pelaksanaan pembangunan dalam Penyehatan Lingkungan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

*D. Bidang Sumber Daya Air*

- 1. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, bimbingan, Pengelolaan dan pengembangan konservasi sumber daya air dan jaringan irigasi serta penyiapan data ketersediaan dan pemanfaatan air;
- 2. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana pengembangan konservasi sumber daya air dan jaringan irigasi;

- b. Pengawasan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pemanfaatan atas sumber daya air dan jaringan irigasi pertanian, industri, air bersih dan keperluan lainnya;
  - c. Penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya yang terkait dengan pengairan;
  - d. Pemantauan pada daerah pengaliran sungai (DPS) dan pantai serta pengamanannya;
  - e. Penyiapan rekomendasi perijinan pengembangan sumber daya air serta pemanfaatan sumber daya alam di wilayah sumber daya air dan jaringan irigasi;
  - f. Pelaksanaan pemberian bimbingan penerapan teknologi pengairan;
  - g. Pengumpulan dan pengolahan data, monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya air serta pelaporan;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pada Bidang Sumber Daya Air terdapat 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
- a. Sub Bidang Perencanaan Prasarana Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - b. Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - c. Sub Bidang Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### *E. Bidang Penataan Ruang*

1. Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensosialisasikan, menertibkan pemanfaatan;
2. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja kegiatan bidang;
  - b. Merumuskan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
  - c. Melaksanakan kegiatan anggaran bidang;
  - d. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi terkait;
  - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pertambangan dan energi;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pada Bidang Penataan Ruang terdapat 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
  - a. Sub Bidang Perencanaan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemanfaatan ruang serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - b. Sub Bidang Pemanfaatan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemanfaatan tata ruang serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - c. Sub Bidang Pengendalian Tata Ruang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian tata ruang serta tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

*F. UPTD Work Shop*

1. Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor: 12 Tahun 2009, Tentang unit Pelaksana Tekhnis Daerah Kota Bima ditetapkan "Workshop Alat Berat dan Laboraturium" sebagai UPTD dibawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima;
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, UPT Workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan pengelolaan alat berat dan fasilitas laboraturium pengujian material;

- b. Merencanakan dan mengorganisasikan pemeliharaan alat berat secara teratur dan konsisten untuk memenuhi kesiapan dan pendayagunaan alat berat dan laboratorium sesuai dengan target yang telah ditentukan;
- c. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dan penyewaan alat berat dan laboratorium;
- d. Menganalisa kerusakan yang terjadi pada alat berat dan laboratorium;
- e. Menganalisa dan merekomendasikan biaya perbaikan terhadap kerusakan alat berat dan laboratorium;
- f. Menyediakan laporan pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan dan penyewaan alat berat dan laboratorium.

#### **1.4. Gambaran Umum Pelayanan**

##### **1.4.1. Kinerja Pelayanan SKPD**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi organisasi yang bersifat *teknis*, oleh karena itu lembaga ini berperan penting dalam Pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan daya saing nasional. Melalui kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tepat, maka hal tersebut diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antar-kawasan maupun antar-wilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi tekanan urbanisasi yang secara keseluruhan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu, infrastruktur Pekerjaan Umum juga berperan sebagai pendukung kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya antara lain sektor pertanian, industri, kelautan dan perikanan. Pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum karenanya berperan sebagai stimulan dalam mendukung perkembangan ekonomi wilayah yang signifikan.

Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman tersebut terlihat melalui: (i) Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berperan untuk mendukung distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun pembentuk struktur ruang wilayah; (ii) Infrastruktur sumber daya air yang berperan dalam penyimpanan dan pendistribusian air untuk keperluan domestik (rumah tangga), industri, dan pertanian guna mendukung ketahanan pangan, dan pelaksanaan konservasi sumber daya air, serta pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak

air; dan (iii) Infrastruktur permukiman yang berperan dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan dan revitalisasi kawasan serta pengembangan kawasan agropolitan. Seluruh penyediaan infrastruktur tersebut diselenggarakan berdasarkan penataan ruang.

Kondisi infrastruktur pekerjaan umum saat ini menunjukkan tingkat yang beragam. Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) belum optimal dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum secara keseluruhan. Menurunnya fungsi jaringan irigasi disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan di samping rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Selain itu, kondisi debit sungai yang airnya digunakan untuk kebutuhan irigasi sangat fluktuatif antara musim hujan dan musim kemarau.

Pengelolaan irigasi juga melibatkan masyarakat melalui Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) ataupun Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan jaringan irigasi khususnya di jaringan tersier. Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bima adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) DI.

Berkembangnya daerah permukiman telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Keandalan penyediaan air baku juga berkurang akibat menurunnya fungsi dan kapasitas tampungan air (seperti Dam, Embung/telaga, Bendungan). Kondisi ini juga diperparah oleh kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah. Akses terhadap air baku untuk rumah tangga dan industri (termasuk perhotelan) yang masih rendah memicu eksplorasi air tanah yang cenderung meningkat yang kalau tidak dikendalikan bisa menyebabkan land subsidence.

Penambahan penyediaan air baku bagi masyarakat dilaksanakan melalui Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, dalam rangka penyediaan air baku untuk memenuhi berbagai kebutuhan, khususnya untuk irigasi dan air bersih. Sumber air diambil dari air tanah melalui pengeboran sumur dalam, atau melalui bangunan pengambilan yang dipasang di sungai dan kemudian dinaikkan ke atas dengan pompanisasi. Khusus untuk irigasi, lahan pertanian yang diairi selama ini merupakan sawah tadah hujan. Dengan tersedianya irigasi sistem pompa, petani telah dapat meningkatkan produksi di lahan pertaniannya.



Dalam hal potensi daya rusak air, terjadi perluasan dampak kerusakan akibat banjir dan kekeringan (seperti banjir di wilayah-wilayah permukiman tepi sungai). Selain itu juga terdapat fenomena meluasnya kerusakan pantai akibat abrasi yang mengancam keberadaan pusat-pusat perekonomian di sekitarnya.

Penanganan banjir terhadap daerah potensi dilaksanakan melalui Program Pengendalian Banjir dalam rangka pemeliharaan sungai dan bantaran sungai. Setiap terjadi banjir, tebing sungai mengalami gerusan yang mengakibatkan longsor tebing sungai. Untuk penanganan hal tersebut diperlukan konstruksi penahan tebing yang aman dan ramah lingkungan berupa konstruksi bronjong.

Infrastruktur bidang Cipta Karya yang mencakup sub bidang air minum, sanitasi, drainase, pengembangan permukiman, dan penataan bangunan dan lingkungan menunjukkan pula kondisi yang beragam.

Untuk sub bidang air minum, dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam pelaksanaannya telah dirumuskan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, termasuk diantaranya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), sehingga sistem penyediaan air minum yang efektif dan berkesinambungan telah memiliki rujukan strategis yang jelas.

Secara total target tingkat pelayanan air minum saat ini belum mampu terpenuhi, termasuk kualitas air minum PDAM yang masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2007 sebanyak 11,34% rumah tangga masih membuang sampah ke kali/selokan yang menyebabkan mampatnya saluran drainase. Di sisi lain banyak dijumpai pula bahwa fungsi saluran drainase tidak tegas apakah untuk mengalirkan kelebihan air permukaan atau juga berfungsi sebagai saluran air limbah.

Adapun pada sisi manajemen, yang juga tidak kalah penting perannya dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman, kondisi saat ini yang masih dirasakan adalah belum fokus dan berjalannya fungsi-fungsi manajerial secara optimal. Kondisi mencolok yang paling terasa adalah implementasi fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar bidang/sub bidang yang menjadikewenangan Dinas



Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang masih lemah termasuk dengan sektor pembangunan lainnya. Selain itu dimensi penyelenggaraan infrastruktur yang berkelanjutan termasuk aspek pemanfaatan teknologi dan aspek pengelolaan yang memperhitungkan risiko kegagalan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan prima bagi masyarakat juga belum cukup mendapat perhatian. Kondisi manajerial tersebut diperlemah pula oleh sistem pengendalian internal dan belum sepenuhnya aparat pelaksana patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mencerminkan belum cukup besarnya kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

Sedangkan untuk memwadahi kegiatan konservasi energi yang diamanatkan oleh pemerintah yang dituangkan dalam regulasi-regulasi terkait konservasi energi, maka disusun program baru yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi. Program ini bertujuan untuk implementasi dan penerapan konservasi energi dengan arah kebijakan meningkatkan efisiensi penggunaan energi melalui konservasi energi pada sektor-sektor pengguna energi prioritas.

#### 1.4.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

##### 1.4.2.1. Tantangan

Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

###### a. Tantangan pembangunan Bidang Sumber Daya Air (SDA).

1. Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestasi dan eksplorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan land subsidence dan intrusi air asin/laut.
2. Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target Millennium Development Goals (MDGs) yang menetapkan bahwa pada tahun 2017 separuh dari jumlah penduduk Indonesia harus dapat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air minum.

3. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama 5 bulan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7 bulan.
  4. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi
  5. Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan, serta abrasi pantai.
  6. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.
- b. Tantangan pembangunan Bidang ke Bina Marga-an.
1. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik daerah dan nasional.
  2. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
  3. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
  4. Menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah terutama percepatan pembangunan kawasan terisolir.
  5. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta outlet.
  6. Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global, terutama pada wilayah Kota Bima.
  7. Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan jalan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.
- c. Tantangan pembangunan Bidang ke Cipta Karya-an.
1. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas.

2. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
  3. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
  4. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.
  5. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
- d. Tantangan pembangunan Bidang Penataan Ruang.
1. Dalam prosesnya kerap meninggalkan dimensi kemanusiaan, karena lebih fokus pada konektivitas infrastruktur, dan sering disebut sebut sebagai dehumanisasi perencanaan, yang apabila dibiarkan akan menghasilkan ruang-ruang yang tidak layak huni karena menerobos daya dukung lingkungan (*carrying capacity*), delineasi ekoregion, dan optimasi ruang.
  2. Pertumbuhan ekonomi, investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar terhambat karena konflik ruang. Proyek-proyek strategis bertabrakan dengan produk rencana di level nasional dan lokal
- e. Tantangan pembangunan Sekretariat Dinas.
1. Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur berbagai wilayah dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat membutuhkan SDM yang handal.
  2. Reformasi birokrasi dalam rangka mencapai 3 (tiga) strategic goals yaitu: kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi bagi peningkatan kualitas lingkungan.
  3. Peningkatan peran koordinasi penyelenggaraan infrastuktur pekerjaan umum antar tingkatan pemerintahan dan antar pelaku pembangunan.
  4. Penyelenggaraan good governance yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.

5. Pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung perubahan peran ke depan yang diharapkan berubah dari yang semula lebih dominan sebagai operator-regulator menjadi dominan regulator-fasilitator.

#### 1.4.2.2. Peluang

Adapun beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.
- b. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif/ swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
- c. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kota Bima
- d. Adanya kemungkinan keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, dan lembaga-lembaga lainnya.
- e. Peningkatan komitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten dan terpadu akan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (sustainable development)
- f. Adanya kerja sama dengan instansi lain untuk memenuhi Permintaan Personil yang bertugas sebagai Pengawas teknis proyek (PTP);
- g. Meningkatnya kesadaran pelaku jasa konstruksi (rekanan) terhadap pentingnya Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi (K3);
- h. Tuntutan masyarakat akan reformasi dalam pelayanan kecepatan dan ketepatan pelayanan mendapatkan informasi (pelayanan prima)

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

Berdasarkan Perda Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013, tentang RPJMD Kota Bima 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 143). Adapun Visi pembangunan daerah Kota Bima sebagaimana tertuang dalam RPJMD adalah :

**"TERWUJUDNYA KOTA BIMA SEBAGAI KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERIMAN, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA"**

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka misi Pembangunan Daerah Kota Bima adalah :

1. Membentuk manusia yang BERIMAN melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal.
2. Mewujudkan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual.
3. Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima.
4. Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan.

Berpedoman pada visi dan misi yang ke-4 pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2013-2018 serta tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat maka ditetapkan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima yakni:

**"Terwujudnya Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Permukiman Yang Optimal"**.



Makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman yang optimal, merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang pekerjaan umum dan Penataan ruang yang penjabarannya meliputi:

- a. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
- b. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata;
- c. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai;
- d. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
- e. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
- f. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang; dan
- g. Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien.

Beranjak dari visi tersebut maka dirumuskan/ditetapkan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2013-2018, yaitu:

**“Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dan perencanaan yang berkualitas”**

Langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya merealisasikan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dalam mendukung visi dan misi Daerah Kota Bima, telah melakukan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan Program/kegiatan pembangunan sesuai standar pelayanan minimal SPM, dengan cara memperketat pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan sarana/prasarana dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Visi dan misi yang sudah dirumuskan perlu dilengkapi dengan tujuan, sasaran serta indikator kinerja untuk memudahkan langkah pelaksanaannya maupun pengukuran hasil atau tingkat capaian dari visi dan misi tersebut.

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima beserta indikator kinerja setiap tahunnya disajikan sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima  
Tahun 2013 – 2018

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke					Program/Kegiatan	Jumlah Target Anggaran 2013-2018
							ke-1 (2014)	ke-2 (2015)	ke-3 (2016)	ke-4 (2017)	ke-5 (2018)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dan perencanaan yang berkualitas	Meningkatkan kualitas infrastruktur bidang Pekerjaan Umum	Meningkatnya kualitas infrastruktur keciptakaryaan	Peningkatan ketersediaan infrastruktur air limbah	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah	Porsentase Rumah Tangga Bersanitasi	71,00%	74,67%	76,50%	80,00%	90,00%	100,00%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	46.149.608.800
												1 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	
			Peningkatan ketersediaan infrastruktur air minum	Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum.	Porsentase Rumah tangga pengguna air bersih	70,00%	75,88%	80,83%	87,00%	95,00%	100,00%	1 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	
			Penyelenggaraan jalan mulai dari wilayah kecamatan menuju aksesibilitas kawasan pusat kegiatan dan pusat produksi	pembukaan jalan baru menuju wilayah pusat produksi dan pusat kegiatan	Prersentase Konektivitas pusat kegiatan dan Pusat Produksi (PK/PP)	84,08%	88,00%	90,00%	94,56%	97,20%	100,00%	Program pembangunan jalan dan jembatan	209.454.735.000
												2 Pembangunan jembatan	



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke					Program/Kegiatan	Jumlah Target Anggaran 2013-2018
							ke-1 (2014)	ke-2 (2015)	ke-3 (2016)	ke-4 (2017)	ke-5 (2018)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya kualitas jaringan irigasi teknis	Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi	Melaksanakan pembangunan/rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan meningkatkan kinerja operasi dan pemeliharaan	Porsentase Jaringan Irigasi Teknis	43%	47,00%	50,00%	52,00%	60,00%	65,00%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 2 Pembangunan Jaringan Irigasi	23.183.323.500
		Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Pemeliharaan dan peningkatan jalan dengan kondisi baik	Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun	Porsentase Panjang Jaringan Jalan Kota dalam Kondisi Baik	60,36%	60,93%	65,00%	70,00%	73,42%	85,00%	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 2 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	50.146.743.000
												Program Peningkatan Jalan & Jembatan 1 Peningkatan Jalan 2 Peningkatan Jembatan	127.866.169.000
												Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 1 Penyusunan sistem informasi/data base jalan 2 Penyusunan sistem	688.740.000





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke					Program/Kegiatan	Jumlah Target Anggaran 2013-2018
							ke-1 (2014)	ke-2 (2015)	ke-3 (2016)	ke-4 (2017)	ke-5 (2018)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												informasi/data base jembatan	
												Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	2.289.207.500
												1 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	
												2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
					Porsentase penerangan jalan umum yang berfungsi baik	0,00%	0,00%	0,00%	79,64%	100,00%	100,00%	Program Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum	12.167.827.000
												1 Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	
			Pengurangan jumlah titik genangan air	Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mengurangi titik genangan air	Porsentase Meningkatnya Kelancaran saluran drainase	20,13%	27,00%	35,00%	42,00%	50,89%	59,79%	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	21.128.951.400
												1 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	
					Porsentase Panjang Sungai Tertangani	42,00%	44,00%	46,00%	48,00%	50,00%	52,00%	Program pembangunan turap/talud/bronjong	31.365.067.800
												1 Pembangunan turap/talud/bronjong	
			Peningkatan kualitas	Meningkatkan kualitas	Porsentase luas	108,98 Ha	92,66 Ha	88,99 Ha	85,92 Ha	79,42 Ha	74,42 Ha	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	42.248.195.000



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke					Program/Kegiatan	Jumlah Target Anggaran 2013-2018
							ke-1 (2014)	ke-2 (2015)	ke-3 (2016)	ke-4 (2017)	ke-5 (2018)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			lingkungan permukiman	lingkungan permukiman melalui fasilitas penyediaan prasarana, sarana dasar permukiman, yang memadai dan terpadu	permukiman kumuh Tertangani							1 Penetaan lingkungan permukiman penduduk perdesaan 2 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	55.597.006.200
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan tata ruang yang sesuai ketentuan	Peningkatan Kualitas Produk Perencanaan Ruang	Percepatan Penyelesaian dan Peningkatan Kualitas RTR & Rencana Rinci	Luas wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang	0%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Program Pemanfaatan Ruang 1 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang 2 Monitoring, evaluasi dan pemanfaatan ruang	1.080.517.000
												Program Perencanaan Tata Ruang 1 Penetapan kebijakan tentang RDTRK,	1.898.723.700



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke					Program/Kegiatan	Jumlah Target Anggaran 2013-2018
							ke-1 (2014)	ke-2 (2015)	ke-3 (2016)	ke-4 (2017)	ke-5 (2018)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												RTRK, dan RTBL	
												2 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	
												3 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	
												4 Survey dan pemetaan	
		Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan Efektivitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penegakan Aturan Zonasi, insentif, sanksi	Peningkatan jumlah bangunan ber IMB	3,94%	0,00%	0,00%	0,00%	5,76%	6,13%	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	418.640.000
												1 Penerbitan Sertifikasi IMB	
												2 Penerbitan Sertifikat SLF (Sertifikat Layak Fungsi)	
												3 Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)	

## 2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) tahun 2017 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2013-2018. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2017 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Dina Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome)	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur keciptakaryaan	Porsentase Rumah Tangga Bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga bersanitasi (Rumah Tanga)}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga (Rumah Tanga)}} \times 100$
		Porsentase Rumah tangga pengguna air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga Pengguna Air Minum (Rumah Tanga)}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga (Rumah Tanga)}} \times 100$
		Prersentase Konektivitas pusat kegiatan dan Pusat Produksi (PK/PP)	$\frac{\text{Rencana Penambahan Ruas Jalan Baru Penghubung PK}}{\text{Total Rencana Panjang Jalan yang Menghubungkan Seluruh PK (Km) Akhir RENSTRA}} \times 100$
2.	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi teknis	Porsentase Jaringan Irigasi Teknis	$\frac{\text{Panjang Saluran Irigasi Teknik (m)}}{\text{Panjang Jaringan Irigasi}} \times 100$
3.	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Porsentase Panjang Jaringan Jalan Kota dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Panjang Jalan dalam kondisi baik (Km)}}{\text{Panjang Jalan Seluruhnya (Km)}} \times 100$
		Porsentase	Titik lampu menyala $\times 100$

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome)	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
(1)	(2)	(3)	(4)
		Panjang Jaringan Jalan Kota dalam Kondisi Baik	Jumlah Titik Lampu
		Porsentase Meningkatnya Kelancaran saluran drainase	$\frac{\text{Panjang saluran drainase terbangun}}{\text{Total panjang saluran drainase}} \times 100$
		Porsentase Panjang Sungai Tertangani	$\frac{\text{Panjang Turap/Talud/Bronjong terbangun (M)}}{\text{Total panjang Sungai (M)}} \times 100$
		Porsentase luas permukiman kumuh Tertangani	$\frac{\text{panjang jalan lingkungan tertangani}}{\text{panjang jalan lingkungan}} \times 100$
			Luas kawasan kumuh - Luas Kawasan Tertangani
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan tata ruang yang sesuai ketentuan	Luas wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang	Kumulatif
5.	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan jumlah bangunan ber IMB	Jumlah Bangunan Ber IMB
			$\frac{\text{Jumlah Bangunan Ber IMB}}{\text{Jumlah Bangunan}} \times 100$

### 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2017

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima tahun 2017 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2013-2018 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda tahun 2017.

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2017

Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas infrastruktur keciptakaryaan	Porsentase Rumah Tangga Bersanitasi	90,00%
	Porsentase Rumah tangga pengguna air bersih	95,00%
	Prersentase Konektivitas pusat kegiatan dan Pusat Produksi (PK/PP)	97,20%
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi teknis	Porsentase Jaringan Irigasi Teknis	60,00%
Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Porsentase Panjang Jaringan Jalan Kota dalam Kondisi Baik	73,42%
	Porsentase penerangan jalan umum yang berfungsi baik	100,00%
	Porsentase Meningkatnya Kelancaran saluran drainase	50,89%
	Porsentase Panjang Sungai Tertangani	50,00%
	Porsentase luas permukiman kumuh Tertangani	27,13 %
Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan tata ruang yang sesuai ketentuan	Luas wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang	100,00%
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan jumlah bangunan ber IMB	5,76%

#### 2.4. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima

amanah adalah Kepala Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

- a. sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
- d. sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima pada awal tahun 2017 terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja utama dengan anggaran Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 15 (lima belas) program dengan total anggaran sebesar 173.889.552.300,-

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur keciptakaryaan	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	90,00%
		Persentase Rumah tangga pengguna air bersih	95,00%
		Persentase Konektivitas pusat kegiatan dan Pusat Produksi (PK/PP)	97,20%
2.	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi teknis	Persentase Jaringan Irigasi Teknis	60,00%
3.	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Panjang Jaringan Jalan Kota dalam Kondisi Baik	73,42%
		Persentase penerangan jalan umum yang berfungsi baik	100,00%
		Persentase Meningkatnya Kelancaran saluran drainase	50,89%



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan tata ruang yang sesuai ketentuan	panjang sungai yang berfungsi baik	50,00%
		Porsentase luas permukiman kumuh Tertangani	27,13 %
		Luas wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang	100,00%
5.	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan jumlah bangunan ber IMB	5,76%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	8.729.003.000,00
2	Program pembangunan jalan dan jembatan	7.429.736.000,00
3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	7.096.617.000,00
4	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	16.009.856.000,00
5	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	72.765.688.000,00
6	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	241.000.000,00
7	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	522.330.000,00
8	Program Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum	4.617.827.000,00
9	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	4.001.018.000,00
10	Program pembangunan turap/talud/bronjong	8.942.796.000,00
11	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	14.275.773.000,00
12	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	27.715.894.800,00
13	Program Pemanfaatan Ruang	419.147.000,00
14	Program Perencanaan Tata Ruang	966.166.500,00
15	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	156.700.000,00





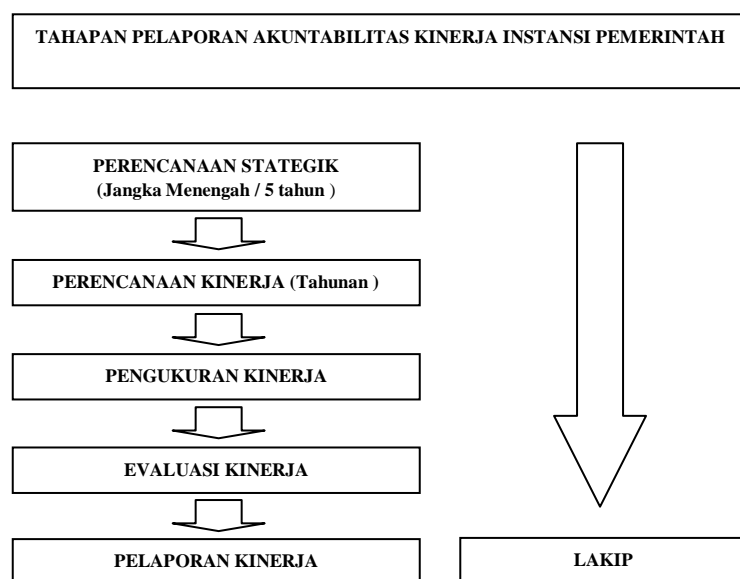
### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem akuntabilitas kinerja dimaksud merupakan tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang diselenggarakan melalui proses dan tahapan perencanaan stratejik, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sistem tersebut membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu, yang merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggara pembangunan dan pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan misi organisasi.

Dengan demikian, maka akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima tahun 2017 merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari penetapan kinerja tahun 2017 yang diturunkan dari rencana kinerja tahunan perencanaan stratejik (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013-2018. Rangkaian proses perencanaan stratejik tahun 2013-2018, perencanaan kinerja tahun 2017, serta keseluruhan proses pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja sebagai suatu sistem akuntabilitas kinerja, dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Proses Pengukuran dan Pelaporan Kinerja



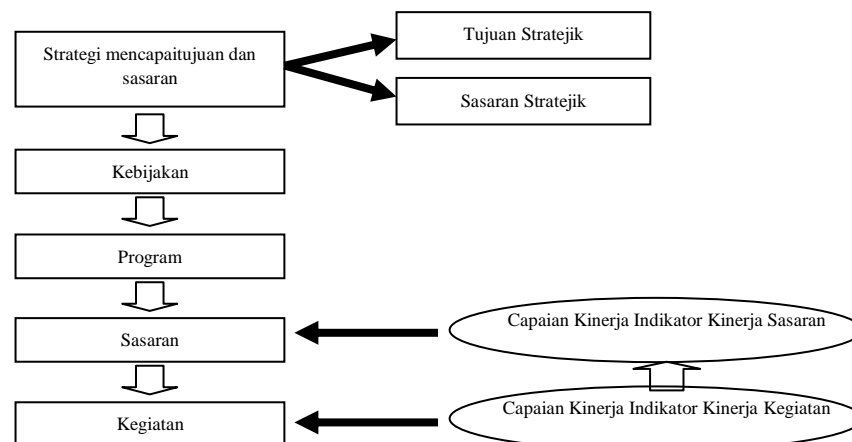
Sebagaimana telah diuraikan pada bab II, siklus kinerja dimulai dari perencanaan stratejik, meliputi proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta rencana stratejik Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013-2018, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pada tahap selanjutnya dilaksanakan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang dimuat dalam penetapan kinerja.

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ditetapkan metode pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematis dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan stratejik dan perencanaan kinerja tahunan. Pengukuran kinerja tahun 2015 dilaksanakan terhadap kinerja realisasi aktual penetapan kinerja tahun 2015 sebagai ikhtisar rencana kinerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 yang diturunkan dari kebijakan program dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013-2018. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian terhadap kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator keluaran (output), dan indikator hasil (outcome), sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya.

Gambar 3.1. Tahapan Pengukuran Kinerja



Di dalam pengukuran indikator kinerja dilakukan pemilahan atas produk yang sifatnya fisik lapangan dan terhadap produk non teknis yang berupa piranti

lunak yang sifatnya pengaturan/pembinaan/perencanaan/ pengawasan. Adapun tolok ukur pengukuran kinerja disepakati didasarkan pada indikator output dan outcome.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 < 100	Sangat Baik	
2.	76 < 90	Tinggi	
3.	66 < 75	Sedang	
4.	51 < 65	Rendah	
5.	< 50	Sangat Rendah	

Sumber Data : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan untuk membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

### 3.1.1. Evaluasi Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Adapun data pendukung capaian kinerja pada indikator persentase perencanaan SKPD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun 2016 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1.1.a. Evaluasi Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2017

No	PROGRAM	RPJMD	RKPD	KUA/PPAS	RENSTRA	RENJA/RKT	DPA/DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>URUSAN WAJIB</b>						
	<b>Pekerjaan Umum</b>						
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√		√	√	√
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√		√	√	√
3	Program peningkatan disiplin aparatur	√			√	√	√
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√			√	√	√
5	Program peningkatan	√	√		√	√	√

No	PROGRAM	RPJMD	RKPD	KUA/ PPAS	RENSTRA	RENJA /RKT	DPA/ DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
	pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
6	Program Peningkatan Jalan & Jembatan			√	√	√	√
7	Program pembangunan jalan dan jembatan	√	√	√	√	√	√
8	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	√	√	√	√	√	√
9	Program pembangunan turap/talud/bronjong	√	√		√	√	√
10	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	√	√	√	√	√	√
11	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan				√	√	√
12	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan				√	√	√
13	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	√	√	√	√	√	√
14	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	√	√	√	√	√	√
15	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	√	√	√	√	√	√
16	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	√		√	√	√	√
17	Program Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum				√	√	√
	Jumlah	13	10	8	17	17	17
	<b>Penataan Ruang</b>						
18	Program Perencanaan Tata Ruang	√	√	√	√	√	√
19	Program Pemanfaatan Ruang	√	√	√	√	√	√
20	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	√	√	√	√	√	√
	Jumlah	3	3	3	3	3	3
	<b>Total</b>	16	13	11	20	20	20

### 3.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima yang dicerminkan dalam Capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

#### a. Capaian Kinerja Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasarana Dasar

Tolok ukur capaian kinerja sasaran “**meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar**” terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu:

- 1). Persentase Rumah Tangga Bersanitasi.

$$\% \text{ Rumah Tangga Bersanitasi} = \frac{\text{Rumah Tangga Bersanitasi}}{\text{Total Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$$

Program pengembangan pengelolaan Sanitasi yang didukung oleh APBD baik bersumber dari dana DAK maupun DAU pada tahun 2017 jumlah rumah tangga (RT) di Kota Bima sebanyak 38.382 RT. Dari program pengembangan pengelolaan sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah memfasilitasi penanganan jumlah rumah tangga bersanitasi mencapai 33.479 RT dari capaian yang ditargetkan sebanyak 34.558 rumah tangga, sehingga tingkat pencapaian pada indikator rumah tangga bersanitasi di tahun 2017 sebesar 96,92%.

Pada tahun 2016 telah memfasilitasi rumah tangga bersanitasi sebanyak 30.794 rumah tangga atau sebesar 100,29% dari target 30.705, maka capai jumlah rumah tangga bersanitasi pada tahun 2017 menunjukkan penurunan 3,37% dari capaian tahun lalu ini disebabkan karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan untuk memperbanyak SR.

Namun bila diukur capaian Renstra, maka mengalami peningkatan, pada tahun 2016 telah mencapai 80,23% dan ditahun 2017 telah mencapai 87,32% maka terjadi peningkatan sebesar 7,09%, dibandingkan tahun lalu hanya 5,83%.

Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra dan akhir RPJMD 2018 sebesar 38,414 rumah tangga atau sebesar 100%, maka capain program/kegiatan telah mencapai 87,32% rumah tangga bersanitasi. Ini dapat disimpulkan capaian program/kegiatan yang telah

dilaksanakan mengalami peningkatan dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh pengalokasian anggaran untuk belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima untuk Program Sanitasi lebih besar dari tahun sebelumnya dan Keikutsertaan masyarakat di dalam mengontrol pembangunan daerah semakin tinggi.

Keberhasilan tersebut menunjukkan Semangat kerja dan disiplin kerja aparatur semakin meningkat.

Capaian target indicator kinerja diatas dapat dilihat seperti dalam table dibawah ini:

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Rumah Tangga Bersanitasi

No.	Indikator	Capaian 2016 (%)	2017			Target Akhir Renstra (Rumah Tangga)	Capaian s.d. 2017 terhadap 2018 (%)
			Target (Rumah Tangga)	Realisasi (Rumah Tangga)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase rumah tangga Bersanitasi	80,23	34.558	33.479	96,92	38,414	87,32

2). Persentase Rumah tangga pengguna air bersih.

$$\% \text{ Rumah Tangga Pengguna Air Bersih} = \frac{\text{Rumah Tangga Pengguna Air Bersih}}{\text{Total Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$$

Air bersih dengan standar air minum adalah kebutuhan dasar masyarakat. Pertumbuhan jumlah penduduk dan keragaman kegiatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan air Bersih di kawasan perkotaan dan juga perdesaan.

Capaian kinerja program pengembangan pengelolaan Air Bersih yang didukung oleh APBD dan APBN pada tahun 2017 telah memfasilitasi jumlah rumah tangga berakses air bersih layak dengan tingkat pencapaian sebesar 35.790 rumah tangga dari target 36.478 rumah tangga atau sebesar 98,15% pada tahun 2017.

Pada tahun 2016 dapat memfasilitasi rumah tangga berakses air bersih layak sebanyak 33.467 atau sebesar 100,22% dari target 33.392

rumah tangga maka terjadi penurunan sebesar 6.97% dari capaian tahun lalu.

Namun bila diukur capaian Renstra, maka mengalami peningkatan, pada tahun 2016 telah mencapai 87,19% dan ditahun 2017 telah mencapai 93,25% maka terjadi peningkatan sebesar 6,05%.

Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir RENSTA dan target Akhir RPJMD 2018 sebesar 38.414 rumah tangga atau 100%, maka capaian kinerja rumah tangga berakses air minum layak 93,25%.

Ini dapat disimpulkan capaian program/kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh pengalokasian anggaran untuk belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima lebih besar dari tahun sebelumnya dan Keikutsertaan masyarakat di dalam mengontrol pembangunan daerah semakin tinggi.

Keberhasilan tersebut menunjukkan Semangat kerja dan disiplin kerja aparatur semakin meningkat.

Capaian target indicator kinerja diatas dapat dilihat seperti dalam table dibawah ini:

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

No.	Indikator	Capaian 2016 (%)	2017			Target Akhir Renstra (Rumah Tangga)	Capaian s.d. 2017 terhadap 2018 (%)
			Target (Rumah Tangga)	Realisasi (Rumah Tangga)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih	87,19	36.478	35.790	98,15	38.414	93,25

### 3). Persentase Konektivitas Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi.

$$\% \text{ Konektivitas pusat kegiatan dan Pusat Produksi } \left( \frac{PK}{PP} \right) = \frac{\text{Rencana Penambahan Ruas Jalan Baru Penghubung PK (Km)}}{\text{Total Rencana Panjang Jalan yang Menghubungkan Seluruh PK (Km) Akhir RENSTRA}} \times 100$$

Pencapaian indikator Konektivitas Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi yang diwujudkan melalui program pembangunan jalan dan



jembatan. Telah terealisasi sebesar 101,45% atau sepanjang 265,13 Km dari yang ditargetkan sepanjang 261,22 Km.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 yang terealisasi 255,52 Km dari target 254,23 Km atau 100,51%, maka capaian tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,94% dari tahun lalu,

Sedangkan bila diukur dengan capaian kinerja Renstra, realisasi capai indicator ini pada tahun 2017 sebesar 98,61% dari target 97,20%, ini menunjukkan kinerja Dinas PUPR pada indikator ini sangat baik karena melampaui target renstra tahun pengukuran.

Dan bila dibandingkan dengan target akhir RENSTRA dan target akhir RPJMD 2018 sepanjang 268,86 km atau 100% maka pencapaian kinerja pada indikator Konektivitas Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi melalui program pembangunan jalan dan jembatan sudah mencapai 265,13 Km atau sebesar 98,61%. Sehingga terjadi peningkatan penambahan panjang jalan sebesar 9,60 Km atau 2,84%

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh pengalokasian anggaran untuk belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima lebih besar dari tahun sebelumnya dan Keikutsertaan masyarakat di dalam mengontrol pembangunan daerah semakin tinggi.

Keberhasilan tersebut menunjukkan Semangat kerja dan disiplin kerja aparatur semakin meningkat.

Capaian target indicator kinerja diatas dapat dilihat seperti dalam table dibawah ini:

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Konektivitas Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi

No.	Indikator	Capaian 2016 (%)	2017			Target Akhir Renstra (km)	Capaian s.d. 2017 terhadap 2018 (%)
			Target (km)	Realisasi (km)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Konektivitas Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi	95,04	261,33	265,13	101,45	268,86	98,61

#### 4). Persentase Jaringan Irigasi Teknis.

$$\% \text{ Jaringan Irigasi Teknis} = \frac{\text{Panjang Saluran Irigasi Teknik (m)}}{\text{Total Panjang Jaringan Irigasi}} \times 100$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 390/2007, luas baku Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kota Bima sebesar 2.616 Ha yang terdiri dari 23 Daerah Irigasi untuk meningkatkan layanan penyediaan air irigasi, Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pedoman Permen Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang pedoman Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi yang menyebutkan bahwa kegiatan pengelolaan jaringan irigasi terdiri dari operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi

Pencapaian indikator Panjang Jaringan Irigasi Teknis yang diwujudkan melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Capaian penambahan panjang jaringan irigasi teknis yang terbangun pada tahun 2017 telah terealisasi sepanjang 33.338,64 M' dari target 27.882,6 M' atau sebesar 119,57%.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 terealisasi sebesar 25.340,64 M' atau sebesar 104,87% dari target 24.164,92, maka capaian kinerja indicator ini pada tahun 2017 menunjukkan kinerja yang lebih baik dari tahun 2016. Dengan peningkatan sebesar 14,70% dari tahun lalu.

Dan bila diukur dengan capaian kinerja Rensra pada tahun 2017 terealisasi sepanjang 71,74% dari yang ditargetkan sebesar 60,00%. Ini menunjukkan kinerja Dinas PUPR pada indikator ini juga melampaui target renstra tahun pengukuran 2017.

Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir RENSTRA dan target akhir RPJMD 2018 sepanjang 30.206,15 M' atau 65,00% maka pencapaian kinerja pada indicator ini melalui program pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya sudah Melampaui Target Target Akhir Renstra dan RPJMD. Ini menunjukkan kinerja yang sangat sangat baik pada indikator ini.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh pengalokasian anggaran untuk belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima lebih besar dari tahun sebelumnya dan Keikutsertaan masyarakat di dalam mengontrol pembangunan daerah semakin tinggi.

Keberhasilan tersebut menunjukkan Semangat kerja dan disiplin kerja aparatur semakin meningkat.

Capaian target indicator kinerja diatas dapat dilihat seperti dalam table dibawah ini:

### Target dan Realisasi Kinerja Indikator Panjang Jaringan Irigasi Teknis

No.	Indikator	Capaian 2016 (%)	2017			Target Akhir Renstra (m)	Capaian s.d. 2017 terhadap 2018 (%)
			Target (m)	Realisasi (m)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Indikator Panjang Jaringan Irigasi Teknis	54,53%	27.882,6	33.338,64	119,57	30.206,15	71,74

#### b. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Baik

Tolok ukur capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik terdiri dari 7 (tujuh) indikator yaitu:

1) Persentase Panjang Jaringan Jalan Kota dalam Kondisi Baik

$$\% \text{ Jaringan jalan dalam kondisi baik} = \frac{\text{panjang jalan dalam kondisi baik (km)}}{\text{Total Panjang jalan (km)}} \times 100$$

Berdasarkan SK Walikota Bima Nomor 482 Tahun 2012 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Kota Bima, menetapkan Panjang Jalan Kota Bima 204,34 Km, di pertengahan tahun 2016 terjadi perubahan atas Penetapan Status Ruas Jalan Kota melalui Perwali nomo 381 Tahun 2016 tentang Penetapan Status dan Fungsi Jalan Kota Bima, dengan Panjang 258,11 Km. sehingga membawa dampak pada perubahan target kinerja pada Renstra Dinas PUPR, RPJMD Kota Bima, Renja dan RKT Dinas PUPR, RKPD Kota Bima dan Perubahan Realisasi Renstra Dinas PUPR serta RPJMD Kota Bima.

Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan pada tahun 2017 ditargetkan jalan dalam kondisi baik sepanjang 189,50 Km, dan terealisasi sepanjang 196,62 Km atau sebesar 103,8%. berdasarkan hasil inspeksi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dalam kondisi baik.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 panjang jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik sebesar 147,14 Km. atau sebesar 102,9% dari target 143,04 Km, maka ditahun 2017 capaian keinerja mengalami peningkatan sebesar 0,90% dari tahun lalu. Berdasarkan indikator ini juga kinerja Dinas PUPR menunjukkan kinerja tahun 2017 lebih baik dari tahun sebelumnya.

Bila diukur dengan target capaian kinerja renstra pada tahun pengukuran sebesar 76,8% dari yang ditargetkan sebesar 73,42% ini juga menunjukkan pencapaian melampaui target renstra tahun pengukuran.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan Target Capaian/Akhir RENSTRA atau akhir RPJMD 2018 yang semula sebesar 173,69 Km atau 85%, dengan Penetapan Status Ruas Jalan Kota Sepanjang 204,43 Km, dan melalui SK penetapan Status Ruas Jalan Kota Bima tahun 2016 tersebut menjadi 258,11 Km, atau 85%, maka pencapaian sasaran tahun pengukuran sebesar 76,18%.

Capaian target indicator kinerja diatas dapat dilihat seperti dalam table dibawah ini:

Target Dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

No.	Indikator	Capaian 2015 (%)	2017			Target Akhir Renstra (km)	Capaian s.d. 2017 terhadap 2018 (%)
			Target (km)	Realisasi (km)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	72,01	189,50	196,62	103,8	258,11	76,18%

## 2) Persentase penerangan jalan umum yang berfungsi baik

$$\% \text{ Penerangan Jalan Umum} = \frac{\text{Jumlah titik lampu yang menyala}}{\text{Total titik lampu}} \times 100$$

Pada tahun 2017 Dinas PUPR diberikan kewenangan pengelolaan PJU, berdasarkan hasil identifikasi pada awal tahun 2017 jumlah PJU tercatat sebanyak 1.552 Titik Lampu dan yang menyala 1.236 Titik lampu atau hanya 79,64% ditahun bersamaan ditargetkan penambahan jumlah PJU sebanyak 18 Buah sehingga Target titik lampu ditahun 2017 menjadi 1.570 Buah/titik lampu yang menyala dan pada akhir tahun 2017 terealisasi 1.570 Titik lampu menyala atau 100% menyala.

Dibandingkan dengan tahun 2016, jumlah titik lampu yang menyala terjadi peningkatan sebesar 20,36%. Atau sebanyak 334 titik lampu menyala

Capaian target indicator kinerja diatas dapat dilihat seperti dalam table dibawah ini:

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Penerangan Jalan Umum Berfungsi Baik

No.	Indikator	Capaian 2016 (%)	2017			Target Akhir Renstra (Buah)	Capaian s.d. 2017 terhadap 2018 (%)
			Target (Buah)	Realisasi (Buah)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Persentase penerangan jalan umum yang berfungsi baik	79,64	1.570	1.570	100	1.935	81,14

3) Persentase Meningkatnya Kelancaran Saluran Drainase

$$\% \text{ Kelancaran Saluran Drainase} = \frac{\text{Panjang Saluran Drainase Terbangun (m)}}{\text{Total Panjang Saluran Drainase (m)}} \times 100$$

Pada tahun 2017 pada indicator Persentase penerangan jalan umum yang berfungsi baik ditetapkan target panjang saluran drainase terbangun 30.399,86 M' dan terealisasi sepanjang 34.066,0438 M' dengan tingkat capaian 112 %.

Dibandingkan dengan tahun 2016 panjang saluran drainase terbangun sepanjang 26.273,61 M' atau 104,73% dari target sepanjang 25.087,86 M'. sehingga ditahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 7,33% dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan capain kinerja indicator ini jauh lebih baik disbanding tahun lalu.

Bila dibandingkan denga pencapaian kinerja tahun pengukuran Renstra yang ditargetkan sepanjang 50,85% dan terealisasi sebesar 57,03% dan ini menunjukkan kinerja yang sangat baik karena melampaui target tahun RENSTRA.

Sedangkan bila diukur dengan target akhir RENSTRA dan target akhir RPJMD 2018 dengan target panjang saluran drainase/gorong-gorong 35.711,86 M' atau 59,79% maka pencapaian kinerja ditahun pengukuran sudah mencapai 34.066.04 M' atau sebesar 57,03% melalui program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.



Capaian target indicator kinerja diatas dapat dilihat seperti dalam table dibawah ini:

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Meningkatnya Kelancaran Saluran Drainase

No.	Indikator	Capaian 2016 (%)	2017			Target Akhir Renstra (m)	Capaian s.d. 2017 terhadap p 2018 (%)
			Target (m)	Realisasi (m)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Persentase Meningkatnya Kelancaran Saluran Drainase	43,99	30.399,86	34.066,04	112,06	35.711,86	57,03%

4) Porsentase Panjang Sungai Tertangani.

$$\% \text{ Panjang Sungai Tertangani} = \frac{\text{Panjang Turap/Talud/Bronjong terbangun (m)}}{\text{Panjang Sungai (m)}} \times 100$$

Panjang sungai yang ada di Kota Bima tercatat 104.000 M', dan yang terbangun sampai dengan tahun 2016 sepanjang 49.166 M'. Pada tahun 2017 ditetapkan target panjang sungai terbangun sepanjang 52.000 M' dan terealisasi pada tahun berkenaan sepanjang 52.925,03 M' atau sebesar 101,78%.

Dibandingkan dengan tahun 2016 panjang saluran drainase terbangun sepanjang 49.166 M' dari target 49.920 M' atau sebesar 98,49%. Ini menunjukkan pada tahun 2017 terjadi peningkatan capaian kinerja pada indicator ini sebesar 3,29% dari tahun sebelumnya.

Bila dibandingkan dengan Capaian Renstra tahun pengukuran yang ditargetkan 50,00% dan terealisasi 50,89% capaian indikato ini pun melampaui target dan menunjukkan pencapaian kinerja yang sangat baik.

Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir RENSTRA dan target akhir RPJMD 2018 sepanjang 54.080 M' atau 52,00% maka pencapaian kinerja pada tahun pengukuran sudah mencapai 50,82% melalui program pembangunan turap/talud/bronjong.

Capaian target indicator kinerja diatas dapat dilihat seperti dalam table dibawah ini:



### Target dan Realisasi Kinerja Indikator Panjang Sungai Tertangani

No.	Indikator	Capaian 2016 (%)	2017			Target Akhir Renstra (m)	Capaian s.d. 2017 terhadap 2018 (%)
			Target (m)	Realisasi (m)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Persentase Panjang Sungai Tertangani	47,28	52.000	52.925,03	101,78	54,080	50,89

#### 5) Porsentase Luas Permukiman Kumuh Tertangani.

$$\% \text{ Lingkungan Pemukiman Kumuh} = \frac{\text{Luas Permukiman Kumuh Tertangani (Ha)}}{\text{Luas Permukiman Kumuh (Ha)}} \times 100$$

Pada Tahun awal perencanaan permukiman kumuh tercatat seluas 108,98 Ha. Pada tahun 2017 direncanakan penanganan pengurangan wilayah kumuh mencapai 29,56 Ha atau sebesar 27,13% dan terealisasi mencapai 32,06 Ha atau 29,42%. Maka capaian kinerja tahun 2017 sebesar 108,45%

Jika dibandingkan pada tahun 2016 sudah terealisasi sebesar 26,20 Ha atau 24,04%. dari target 23,06 Ha dengan peningkatan 3,37 Ha. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 5,86 Ha atau 5,38% dari tahun sebelumnya.

Jika diukur dengan Indikator Kinerja Renstra tahun pelaporan dengan target sebesar 27,13% dan terealisasi 29,42%.

Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir RENSTRA dan target akhir RPJMD 2018 sebesar 108,98 Ha atau 31,71% maka pencapaian kinerja pada indikator ini sudah mencapai 29,42%. Dengan luas Kawasan Kumuh Tertangani sebesar 32,06 Ha.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh pengalokasian anggaran untuk indikator ini pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima lebih besar dari tahun sebelumnya dan Keikutsertaan masyarakat di dalam mengontrol pembangunan daerah semakin tinggi.

Keberhasilan tersebut menunjukkan Semangat kerja dan disiplin kerja aparatur semakin meningkat.

Capaian target indikator kinerja diatas dapat dilihat seperti dalam table dibawah ini:

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Porsentase Luas Permukiman  
Kumuh Tertangani

No.	Indikator	Capaian 2016 (%)	2017			Target Akhir Renstra	Capaian s.d. 2017 terhadap 2018 (%)
			Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Porsentase Luas Permukiman Kumuh Tertangani	24,04	29,56	32,06	108,45	108,98	29,42

6) Persentase Luas wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang.

$$\% \text{ Luas Wilayah Rencana Rincian Tata Ruang} = \frac{\text{Wilayah Rencana Rincian Tata Ruang (Ha)}}{\text{Total Luas Wilayah (Ha)}} \times 100$$

Pada Tahun awal 2013 sampai dengan tahun 2016 urusan Penataan Ruang ditangani oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan dan pada tahun 2017 bersamaan dengan Pembentukan Struktur OPD Baru urusan penataan Ruang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.

Berdasarkan data capaian dinas Tata Kota dan Perumahan tahun 2016 yang menjadi data awal pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Capaian target indicator kinerja diatas dapat dilihat seperti dalam table dibawah ini:

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Porsentase Luas Permukiman  
Kumuh Tertangani

No.	Indikator	Capaian 2016 (%)	2017			Target Akhir Renstra	Capaian s.d. 2017 terhadap 2018 (%)
			Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Persentase Luas wilayah yang telah terlayani oleh	27,78	2058,25	2058,25	100	22.225	37,04





	Rencana Rinci Tata Ruang						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

7) Peningkatan jumlah bangunan ber IMB.

$$\% \text{ Peningkatan jumlah bangunan ber IMB} = \frac{\text{Jumlah Bangunan Ber IMB}}{\text{Jumlah Bangunan}} \times 100$$

Pada Tahun awal 2013 sampai dengan tahun 2016 indikator Peningkatan Jumlah Bangunan Ber-IMB ditangani oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan dan pada tahun 2017 bersamaan dengan Pembentukan Struktur OPD Baru Indikator ini ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.

Berdasarkan data tahun 2016 jumlah bangunan di kota bima sebanyak 39.385 Bangunan dengan Rata-Rata Pertumbuhan Bangunan (dari Thn 2008 s.d. 2015) sebesar 4,095% Capaian dinas Tata Kota dan Perumahan sampai dengan tahun 2016 sebesar 2.088 IMB atau 5,20% dari target 2.112 IMB.

Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Menargetkan capaian pada indicator ini sebesar 250 IMB dan terrealisasi 260 IMB atau 104%.

Jika dibandingkan pada tahun 2016 yang terrealisasi sebesar 250 IMB dari target 250 IMB atau sebesar 100%. Maka capai kinerja tahun 2017 lebih baik dari tahun sebelumnya.

Jika diukur dengan Indikator Kinerja Renstra tahun pelaporan dengan target sebesar 2.362 IMB dan terrealisasi sebanyak 2.348 IMB maka capai kinerja pada tahun renstra 99,41% dengan perkiraan pertumbuhan bangunan sebesar 4,095% atau sebanyak 40.998 Bangunan

Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir RENSTRA dan target akhir RPJMD 2018 sebesar 2.612 IMB atau 6,13% maka realisasi kinerja pada indicator ini sudah mencapai 5,57%.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh pengalokasian anggaran untuk indicator ini pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima lebih besar dari tahun sebelumnya dan Keikutsertaan masyarakat di dalam mengontrol pembangunan daerah semakin tinggi.

Keberhasilan tersebut menunjukkan Semangat kerja dan disiplin kerja aparaturnya semakin meningkat.

Capaian target indicator kinerja diatas dapat dilihat seperti dalam table dibawah ini:

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Porsentase Peningkatan jumlah bangunan ber IMB

No.	Indikator	Capaian 2016 (%)	2017			Target Akhir Renstra	Capaian s.d. 2017 terhadap 2018 (%)
			Target (IMB)	Realisasi (IMB)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Peningkatan jumlah bangunan ber IMB	5,20	250	260	104	2.612	5,57

### 3.2. Akuntabilitas Anggaran

Penyerapan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 sebesar 99,16% dari total anggaran yang dialokasikan dan terbagi dalam belanja tidak langsung terealisasi sebesar 2,46% dan belanja langsung 97,54%. Dengan rinci dapat terlihat pada table berikut:

Tabel 3.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2017.

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>BELANJA</b>	<b>181.692.966.673</b>	<b>180.171.241.431</b>	<b>99,16%</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.489.951.123</b>	<b>4.434.558.363</b>	<b>98,77%</b>
3	Belanja Pegawai	4.489.951.123	4.434.558.363	98,77%
<b>4</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>177.203.015.550</b>	<b>175.736.683.068</b>	<b>99,17%</b>
5	Belanja Pegawai	2.110.428.000	2.080.366.000	98,58%
6	Belanja Barang dan Jasa	7.596.073.550	6.983.576.568	91,94%
7	Belanja Modal	167.496.514.000	166.672.740.500	99,51%

Realisasi anggaran untuk program/kegiatan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 97,89% sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 2,11%

#### a. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasarana Dasar

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan target sasaran dan indicator kinerja di atas telah dijabarkan dalam capaian program/kegiatan seperti dalam table dibawah ini:

Target dan Realisasi Kinerja Anggaran Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap  
Sarana dan Prasarana Dasar

No.	Indikator	Program/Kegiatan	2017			Realisasi Fisik (%)
			Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>URUSAN WAJIB Pekerjaan Umum</b>					
1.	Porsentase Rumah Tangga Bersanitasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	8.729.003.000	8.602.010.000	98,55 %	100,00 %
		Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	3.178.360.000	3.177.491.000	99,97 %	100,00 %
		Pembinaan teknik pengolahan air limbah	44.190.000	44.100.000	99,80 %	100,00 %
		Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masy. berpenghasilan rendah	5.506.453.000	5.380.419.000	97,71 %	100,00 %
2.	Prersentase Konektivitas pusat kegiatan dan Pusat Produksi (PK/PP)	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	7.429.736.000	7.359.519.000	99,05 %	100,00 %
		Pembangunan jalan	7.429.736.000	7.359.519.000	99,05 %	100,00 %
	Porsentase Jaringan Irigasi Teknis	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	7.096.617.000	6.753.885.700	95,17 %	99,45%
		Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	2.080.400.000	2.049.978.000	98,54 %	100,00 %
		Pembangunan Jaringan irigasi	5.016.217.000	4.703.907.700	93,77 %	98,89%
	Jumlah		23.255.356.000	22.715.414.700	97,59 %	99,82%

Hingga akhir tahun 2017 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 99,82% dengan realisasi anggaran 97,59% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.



## b. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Baik

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan target sasaran dan indicator kinerja di atas telah dijabarkan dalam capaian program/kegiatan seperti dalam table dibawah ini:

Target dan Realisasi Kinerja Anggaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Baik

No.	Indikator	Program/Kegiatan	2017			Realisasi Fisik (%)
			Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>URUSAN WAJIB Pekerjaan Umum</b>					
1.	Porsentase Panjang Jaringan Jalan Kota dalam Kondisi Baik	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	16.009.856.000	15.999.981.000	99,94 %	100,00 %
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	15.910.156.000	15.900.281.000	99,94 %	100,00 %
		Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	99.700.000	99.700.000	100,00 %	100,00 %
		PROGRAM PENINGKATAN JALAN & JEMBATAN	72.765.688.000	72.604.171.800	99,78 %	100,00 %
		Peningkatan Jalan	72.765.688.000	72.604.171.800	99,78 %	100,00 %
		PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATABASE JALAN DAN JEMBATAN	241.000.000	239.760.000	99,49 %	100,00 %
		Penyusunan sistem informasi/data base jalan	241.000.000	239.760.000	99,49 %	100,00 %
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	522.330.000	510.234.000	97,68 %	100,00 %
		Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	319.150.000	308.794.000	96,76 %	100,00 %
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan (23.13)	203.180.000	201.440.000	99,14 %	100,00 %
2.	Porsentase penerangan jalan umum	PROGRAM PENINGKATAN SARANA	4.617.827.000	4.427.714.319	95,88 %	100,00 %

No.	Indikator	Program/Kegiatan	2017			Realisasi Fisik (%)
			Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	yang berfungsi baik	PRASARANA PENERANGAN JALAN UMUM				
		Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	4.617.827.000	4.427.714.319	95,88 %	100,00 %
3.	Porsentase Meningkatnya Kelancaran saluran drainase	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	4.001.018.000	3.490.783.158	87,25 %	100,00 %
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	3.121.597.000	2.667.356.000	85,45 %	100,00 %
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	879.421.000	823.427.158	93,63 %	100,00 %
4.	Porsentase Panjang Sungai Tertangani	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	8.942.796.000	8.924.919.000	99,80 %	100,00 %
		Pembangunan turap/talud/bronjong	8.942.796.000	8.924.919.000	99,80 %	100,00 %
5.	Porsentase luas permukiman kumuh Tertangani	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	14.275.773.000	14.912.123.500	104,46 %	100,00 %
		Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan	87.300.000	87.262.000	99,96 %	100,00 %
		Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	14.188.473.000	14.824.861.500	104,49 %	100,00 %
		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	27.715.894.800	27.430.512.000	98,97 %	99,22 %



No.	Indikator	Program/Kegiatan	2017			Realisasi Fisik (%)
			Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7
		Pembangunan/peningkatan infrastruktur	26.966.173.000	26.699.940.000	99,01 %	97,67%
		Pendampingan Program NUSP-Phase 2	557.763.200	555.902.000	99,67 %	100,00 %
		Pendampingan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	191.958.600	174.670.000	90,99 %	100,00 %
	<b>URUSAN WAJIB Penataan Ruang</b>					
6.	Luas wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	966.166.500	705.911.700	73,06 %	100,00 %
		Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	391.690.000	147.240.000	37,59 %	100,00 %
		Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	405.873.900	399.892.900	98,53 %	100,00 %
		Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	93.516.000	86.154.200	92,13 %	100,00 %
		Survey dan pemetaan	75.086.600	72.624.600	96,72 %	100,00 %
		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	419.147.000	417.339.650	99,57 %	100,00 %
		Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	365.958.000	365.223.750	99,80 %	100,00 %
		Monitoring, evaluasi dan pemanfaatan ruang (33.09)	53.189.000	52.115.900	97,98 %	100,00 %
7.	Peningkatan jumlah bangunan ber IMB	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	156.700.000	154.553.650	98,63 %	100,00 %

No.	Indikator	Program/Kegiatan	2017			Realisasi Fisik (%)
			Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7
		Penerbitan Sertifikasi IMB	58.100.000	58.096.900	99,99 %	100,00 %
		Penerbitan Sertifikat SLF (Sertifikat Layak Fungsi)	49.300.000	48.120.000	97,61 %	100,00 %
		Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)	49.300.000	48.336.750	98,05 %	100,00 %
		Jumlah	150.634.196.300	149.818.003.777	96,21 %	99,94%

Hingga akhir tahun 2017 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 99,94% dengan realisasi anggaran 96,21% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien dengan harapan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan kinerja instansi pemerintah SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun berdasarkan Kebijakan umum Anggaran (KUA) tahun anggaran 2017, serta penetapan kinerja Tahun 2017 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan Good Governance.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima pada Tahun Anggaran 2017 merupakan tahun ke-4 (empat) dari Rencana Strategis Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2013-2018. Keberhasilan dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas PUPR tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai factor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.
2. Dari analisis 5 (lima) sasaran, terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja yang dipilih sebagai tolok ukur indikator kinerja utama.
3. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD dirumuskan saran-saran sebagai berikut:
  - a. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM tentang System Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), serta kemampuan teknis dalam penyusunan dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
  - b. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.





## LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja 2017

Lampiran 2 : Pengukuran Kinerja 2017

